



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 7b -DPRD/2019

TENTANG

TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI, BADAN KEHORMATAN, BADAN MUSYAWARAH, BADAN ANGGARAN DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74, Pasal 77, pasal 84, Pasal 86 dan Pasal 89 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka dipandang perlu untuk menetapkan keanggotaan Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa penetapan keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawarata Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, TLNRI Nomor 4540) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan Lampiran V serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan DPRD ini berlaku, maka Keputusan DPRD Nomor : 171.1/Kep. 7A-DPRD/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor :171.1/Kep.07-DPRD/2018. Tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 02 April 2019.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA
TTD**

SARIF HIDAYAT

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Para Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta

Nomor : 171.1/Kep. 7b -DPRD/2019

Tanggal : 02 April 2019

Tentang : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

A. KOMISI I : BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI	PEMBIDANGAN
1	FITRI MARYANI	KETUA	GERINDRA	PERIJINAN & PENANAMAN MODAL
2	H. IHWAN RIDWAN, SE	WK KETUA	NASDEM	KEPEGAWAIAN/ APARATUR
3	HERI ROSNENDI, SH	SEKRETARIS	HANURA	PERTANAHAN
4	H. KOMARUDIN, SH.,MH	ANGGOTA	GOLKAR	HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN
5	UM. SULAEMAN	ANGGOTA	GOLKAR	KEAMANAN & KETERTIBAN
6	H. ENTIS SUTISNA, SH.,MM	ANGGOTA	PDI-P 20 DES 2018	PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA
7	ANDRIYANI	ANGGOTA	GERINDRA	KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
8	HIDAYAT, S,Th,	ANGGOTA	PKB	PENERANGAN PERS
9	YANTI NURHAYATI, S.Pd	ANGGOTA	PPP	SOSIAL POLITIK & ORGANISASI MASYARAKAT
10	H. AGUS SUNDANA	ANGGOTA	FAD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

B. KOMISI II : BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI	PEMBIDANGAN
1	H. ASEP SAEPUDIN SAEPUL MILLAH	KETUA	PKB	KEUANGAN DAERAH
2	IMAM SUBEKTI	WK KETUA	HANURA	PERIKANAN & PETERNAKAN
3	H. BUDI SOPANI MUPLIH, S.Ag	SEKRETARIS	PPP	KEHUTANAN, KONSERVASI SDA & ESDM
4	H. MESAKH SUPRIADI, SE.,M.Si	ANGGOTA	GOLKAR	PERPAJAKAN & RETRIBUSI
5	SRI FITRI FATMAWATI	ANGGOTA	GERINDRA 20-12-2018	PANGAN & PERTANIAN
6	LINA YULIANI	ANGGOTA	PDI-P	PERUSAHAAN DAERAH
7	ZEFNAL LAMBERT LILIPOLY	ANGGOTA	PDI-P	PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN. KOPERASI & UMKM
8	ASTRI NOVITASARI	ANGGOTA	NASDEM	PERBANKAN
9	H. AMAS MASTUR, SE	ANGGOTA	FAD	PERUSAHAAN PATUNGAN & DUNIA USAHA

C. KOMISI III : BIDANG PEMBANGUNAN

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI	PEMBIDANGAN
1	H. AHMAD SANUSI	KETUA	GOLKAR	
2	IIS KISWARA	WK KETUA	PDI-P	
3	H. ADE AHMAD, SE	SEKRETARIS	HANURA	
4	H. DUDUNG ABDULLAH	ANGGOTA	GOLKAR	
5	H. OJA SUTISNA	ANGGOTA	GOLKAR	
6	HJ. INA HERLINA	ANGGOTA	PDI-P	
7	RIFKI FAUZI, SH	ANGGOTA	GERINDRA	
8	H. AHMAD SAMITHA, S,BE	ANGGOTA	PKB	
9	ZAENAL ARIPIN	ANGGOTA	PPP	
10	H. APUD SAEPUDIN	ANGGOTA	NASDEM	
11	HAERUL AMIN	ANGGOTA	FAD	
12	DADANG SUDIRMAN ER, SE,MM	ANGGOTA	FAD	

D. KOMISI IV : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI	PEMBIDANGAN
1	UJANG ROSADI	KETUA	PDI-P	KOORDINATOR
2	H. KOMARUDIN NOOR, S.Ag	WK KETUA	PPP	KESEHATAN
3	HJ. ENAH ROHANAH	SEKRETARIS	GOLKAR	SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
4	SUTISNA, SH,MH	ANGGOTA	PDI-P	PENDIDIKAN
5	DINI YULIANI	ANGGOTA	GERINDRA	KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN
6	ALAIKASSALAM, SH.I	ANGGOTA	PKB	PEMUDA & OLAH RAGA
7	DARMITA	ANGGOTA	HANURA	KEAGAMAAN
8	ISEP SAPRUDIN YAHYA, SH,MM	ANGGOTA	NASDEM	PENGADAAN PANGAN & LOGISTIK
9	ASEP CHANDRA	ANGGOTA	FAD	PENGADAAN PANGAN & LOGISTIK
10	RAGIL SUKAMTO	ANGGOTA	FAD	KETENAGAKERJAAN & TRANSMIGRASI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA**

TTD

SARIF HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta
Nomor : 171.1/Kep. 7b -DPRD/2019
Tanggal : 02 April 2019
Tentang : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	SUTISNA, SH,MH	KETUA	PDI-P
2.	DINI YULIANI	WAKIL KETUA	GERINDRA
3.	H. DUDUNG ABDULLAH	ANGGOTA	GOLKAR
4.	H. AHMAD SUMITA S, BE	ANGGOTA	PKB
5.	DARMITA	ANGGOTA	HANURA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA**

TTD

SARIF HIDAYAT

Lampiran III : Keputusan DPRD: 171.1/Kep.7b -DPRD/2019
Nomor : 171.1/Kep. 7b -DPRD/2019
Tanggal : 02 April 2019
Tentang : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	SARIF HIDAYAT	KETUA	GOLKAR
2.	WARSENO	WAKIL KETUA	PDI-P
3.	SRI PUJI UTAMI	WAKIL KETUA	GERINDRA
4.	Hj. NENG SUPARTINI P, S.Ag	WAKIL KETUA	PKB
5.	HJ. ENAH ROHANA	ANGGOTA	GOLKAR
6.	UM SULAEMAN	ANGGOTA	GOLKAR
7.	H. OJA SUTISNA	ANGGOTA	GOLKAR
8.	LINA YULIANI	ANGGOTA	PDI-P
9.	HJ. INA HERLINA	ANGGOTA	PDI-P
10.	ZEFNAL LAMBERT LILIPALY	ANGGOTA	PDI-P
11.	ANDRIYANI	ANGGOTA	GERINDRA
12.	SRI FITRI FATMAWATI (20-12-2018)	ANGGOTA	GERINDRA
13.	ALAIKASSALAM, SH,I	ANGGOTA	PKB
14.	ZAENAL ARIPIIN	ANGGOTA	PPP
15.	YANTI NURHAYATI, S.Pd	ANGGOTA	PPP
16.	ASEP CHANDRA	ANGGOTA	FAD
17.	RAGIL SUKAMTO	ANGGOTA	FAD
18.	DADANG SUDIRMAN ER, SE.,MM	ANGGOTA	FAD
19.	H. ADE AHMAD, SE	ANGGOTA	HANURA
20.	DARMITA	ANGGOTA	HANURA
21.	H. APUD SAEPUDIN	ANGGOTA	NASDEM
22.	H. IHWAN RIDWAN	ANGGOTA	NASDEM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA**

TTD

SARIF HIDAYAT

Lampiran IV : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta**Nomor : 171.1/Kep. 7b -DPRD/2019****Tanggal : 02 April 2019****Tentang : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta.****SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	SARIF HIDAYAT	KETUA	GOLKAR
2.	WARSENO	WAKIL KETUA	PDI-P
3.	SRI PUJI UTAMI	WAKIL KETUA	GERINDRA
4.	HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag	WAKIL KETUA	PKB
5.	H. MESAKH SUPRIADI, SE,M.Si	ANGGOTA	GOLKAR
6.	H. AHMAD SANUSI	ANGGOTA	GOLKAR
7.	H. KOMARUDIN, SH,MH	ANGGOTA	GOLKAR
8.	H. ENTIS SUTISNA, SH.,MM (20-12-2018)	ANGGOTA	PDI-P
9.	UJANG ROSADI	ANGGOTA	PDI-P
10.	IIS KISWARA	ANGGOTA	PDI-P
11.	FITRI MARYANI	ANGGOTA	GERINDRA
12.	RIFKI FAUZI, SH	ANGGOTA	GERINDRA
13.	H. ASEP SAEPUDIN SAEPUL. MILLAH	ANGGOTA	PKB
14.	HIDAYAT, S,Th.I	ANGGOTA	PKB
15.	H. KOMARUDIN NOOR, S.Ag	ANGGOTA	PPP
16.	H. BUDI SOPANI MUPLIH, S.Ag	ANGGOTA	PPP
17.	HAERUL AMIN	ANGGOTA	FAD
18.	H. AMAS MASTUR, SE	ANGGOTA	FAD
19.	H. AGUS SUNDANA	ANGGOTA	FAD
20.	HERI ROSNENDI, SH	ANGGOTA	HANURA
21.	IMAM SUBEKTI	ANGGOTA	HANURA
22.	ASTRI NOVITASARI	ANGGOTA	NASDEM
23.	ISEP SAPRUDIN YAHYA, SH,MM	ANGGOTA	NASDEM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA****TTD****SARIF HIDAYAT**

**Lampiran V : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta
 Nomor : 171.1/Kep. 7b -DPRD/2019
 Tanggal : 02 April 2019
 Tentang : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	UM. SULAEMAN	KETUA	GOLKAR
2.	ALAIKASSALAM, SH,I	WK. KETUA	PKB
3.	HJ. ENAH ROHANAH	ANGGOTA	GOLKAR
4.	IIS KISWARA	ANGGOTA	PDI-P
5.	UJANG ROSADI	ANGGOTA	PDI-P
6.	SRI FITRI FATMAWATI	ANGGOTA	GERINDRA
7.	ANDRIYANI	ANGGOTA	GERINDRA
8.	ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA	PPP
9.	RAGIL SUKAMTO	ANGGOTA	FAD
10.	APUD SAEPUDIN	ANGGOTA	NASDEM
11.	H. ADE AHMAD, SE	ANGGOTA	HANURA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA
 KETUA**

TTD

SARIF HIDAYAT